

**PENGARUH PENERAPAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN  
(PP NO.71 TAHUN 2010) DAN PEMANFAATAN SISTEM  
INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH  
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
(Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab  
Lematang Ilir)**

**SKRIPSI**



**Nama : Fatimah  
NIM : 222015022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2019**

**PENGARUH PENERAPAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN  
(PP NO.71 TAHUN 2010) DAN PEMANFAATAN SISTEM  
INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH  
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
(Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab  
Lematang Ilir)**

**SKRIPSI**



**Nama : Fatimah  
NIM : 222015022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2019**

**PENGARUH PENERAPAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN  
(PP NO.71 TAHUN 2010) DAN PEMANFAATAN SISTEM  
INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH  
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
(Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab  
Lematang Ilir)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Fatimah  
NIM : 222015022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2019**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Pengaruh Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan (PP No.71 Tahun 2010) Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir)

Nama : Fatimah  
NIM : 222015022  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Sistem Informasi Akuntansi

Diterima dan Disahkan  
Pada tanggal, 2019

Pembimbing I,



Welly, S.E., M.Si  
NIDN/NBM : 0212128102/1085022


Pembimbing II,



Nina Sabrina, S.E., M.Si  
NIDN/NBM : 0216056801/851119

Mengetahui,  
Dekan  
u b Ketua Program Studi Akuntansi



  
Betri, S.E., M.Si, AK., CA  
NIDN/NBM : 0216106902/944806

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fatimah  
NIM : 222015022  
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang,.....2019

Yang Membuat Pernyataan



## ABSTRAK

**Fatimah/222015022/2019/Pengaruh Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan (PP No.71 Tahun 2010) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.**

Tujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan penyusunan laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir) baik secara simultan maupun parsial. Sampel pada penelitian ini adalah 66 responden. Penelitian menggunakan teknik analisis uji validitas dan uji reliabilitas, rancangan uji asumsi klasik, rancangan uji regresi linear berganda, koefisien determinasi sedangkan pengujian hipotesis menggunakan uji F statistik untuk pengujian secara simultan serta menggunakan uji t statistik untuk pengujian secara parsial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan penerapan penyusunan laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif sebesar 70,670 dengan signifikan sebesar 0,000 terhadap kualitas laporan keuangan. Secara parsial penerapan penyusunan laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010) berpengaruh positif sebesar 4,474 dengan signifikan sebesar 0,000 terhadap kualitas laporan keuangan. Dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif sebesar 5,507 dengan signifikan sebesar 0,000 terhadap kualitas laporan keuangan.

**Kata Kunci:** penyusunan, pemanfaatan sistem, kualitas laporan keuangan.

### **Abstract**

*The aim of this investigation was to determine the effect of implementation of preparation of financial statements preparation (PP No.71 of 2010) and regional financial accounting information systems utilization on financial statements quality (case study of the services in the government of penukal abab lematang ilir district) both simultaneously and partially. The sample in this study were 66 respondents. This research used of validity and reliability test, classic assumption test design, multiple linear regression test design, determination coefficient analyses technique, while hypotheses testing used F test for simultaneous testing and using statistical t test for partial testing. The results of this study indicated that simultaneous implementation of preparation of financial statements preparation (PP No.71 of 2010) and regional financial accounting information systems utilization had a positive effect of 70,670 with a significant degree of 0,000 on financial statements. Partially, implementation of preparation of financial statements preparation (PP No.71 of 2010) has positive effect of 4,474 with a significant degree of 0,000 on financial statements quality. The regional financial accounting information systems utilization had a positive effect of 5,507 with a significant degree of 0,000 on financial statements quality.*

*Keywords: preparation, utilization of the systems, quality of financial statements.*

## PRAKATA



**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan (PP No.71 Tahun 2010) Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas Di Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir)”**. Skripsi ini penulis ajukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Adapun penelitian ini terbagi menjadi lima bab berturut-turut, bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab simpulan dan saran. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Allah SWT, kedua orang tuaku tercinta, Bapakku Marjoko dan Mamakku Sarijem, kakakku Feri Yanto dan adikku Aminah yang telah memberi semangat, mendoakan dan memberikan dorongan baik materil maupun spirit yang tiada hentinya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada ibu Welly, S.E., M.Si dan ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si yang telah membimbing



dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta Staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Betri, SE., M.Si., Ak., CA dan Ibu Nina Sabrina, SE., M.Si selaku ketua prodi dan sekretaris program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Welly, SE., M.Si dan Ibu Nina Sabrina, SE., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi saya.
5. Bapak Betri, SE., M.Si., Ak., CA selaku pembimbing akademik saya.
6. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Pegawai di kantor Dinas Kabupaten PALI yang dengan tulus mengarahkan dan membantu saya.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam

menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas budi untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Aamiin.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Palembang,.....2019

Penulis,

Fatimah

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PRAKATA.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	13
1. Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan .....	13
2. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah ..	18
3. Kualitas Laporan Keuangan.....	21
B. Penelitian Sebelumnya .....	28
C. Kerangka Pemikiran .....	33
D. Hipotesis.....	33

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	35
B. Lokasi Penelitian .....	36
C. Operasionalisasi Variabel.....	36
D. Populasi .....	37
E. Data Yang Diperlukan.....	38
F. Metode Pengumpulan Data .....	39
G. Analisis Data dan Pengumpulan Data .....	40

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian... ..	52
1. Gambaran Karakteristik Responden .....	52
2. Gambaran Karakteristik Variabel .....	54
3. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian .....	55
4. Jawaban Responden .....	84
B. Hasil Pengolahan Data .....	87
1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan (PP No.71 Tahun 2010) (X <sub>1</sub> ).....	87
2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pemanfaatan SIA.KD.....	90
3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kualitas Laporan Keuangan (Y).....	92
4. Rancangan Uji Asumsi Klasik .....	95
5. Analisis Regresi Linear Berganda .....	100
6. Koefisien Determinasi .....	103

7. Pengujian Hipotesis .....	108
C. Pembahasan .....	111
1. Pengaruh Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan (PP No.71 Tahun 2010) Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	108
2. Pengaruh Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan (PP No.71 Tahun 2010) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan ....	110
3. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	111
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah. Laporan keuangan oleh pemerintah daerah tidak dibuat secara sembarangan, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku. Pelaporan keuangan pemerintah selanjutnya harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah seperti yang tertuang dalam PP Nomor 71 tahun 2010. Hal ini perlu dilakukan agar laporan keuangan mudah dibaca dan dimengerti. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dalam suatu periode.

Dalam sistem pemerintah daerah terdapat dua subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), oleh karena itu setiap OPD harus menyusun laporan keuangan sebaik mungkin. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Ramli, 2016: 10). Karakteristik laporan keuangan

pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Ramli, 2016: 11-12).

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Ramli, 2016: 15). Laporan keuangan dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan hal-hal yang dianggap penting bagi pihak pemerintah daerah. Pelaporan keuangan seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan keuangan melaporkan aktivitas yang sudah dilakukan pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Pelaporan keuangan yang berkualitas sangat penting (Winwin dan Abdulloh, 2017: 7). Pelaporan keuangan yang berkualitas akan dapat menghasilkan output berupa informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Pelaporan keuangan seperti ini dapat dicapai apabila memenuhi karakteristik kualitatif informasi keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Ada delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, yaitu basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar. Tuntutan transparansi dalam sistem pemerintahan semakin

meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sebagai upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggung-jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (*reliable*) serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Menurut PP RI Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan akuntansi daerah menyebutkan bahwa sistem informasi keuangan daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawabkan pemerintah daerah. Informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan sistem informasi akuntansi oleh pemerintah daerah dalam proses penyusunan keuangan pemerintah daerah.



Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah, yang terdiri dari laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), laporan keuangan kementerian/ lembaga (LKLL). Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern (Ramli, 2016: 128). Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penelitian mengenai kualitas laporan keuangan dilakukan oleh Daniel dan Yohanes (2013) yang berjudul pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada Pemerintah Kota Tual). Hasil dari penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Ni Putu, dkk (2014) yang berjudul pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada Dinas-Dinas di Pemerintahan Kabupaten Jembrana), hasil dari

penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana, dan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Dian (2014) yang berjudul pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (studi empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman). Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kota Pariaman, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kota Pariaman, dan peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kota Pariaman.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Susilawati dan Dwi (2014) yang berjudul standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern sebagai antecedent kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 52,0%. Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 13% namun tidak signifikan. Sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 74,6%.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Ali dan Sri (2016) yang berjudul pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Adapun hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur, peran audit internal dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan RI, terdapat daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI atas LKPD tahun 2017 yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, seperti pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, entitas terlambat menyampaikan laporan, dan sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai. Pada IHPS I tahun 2017 yang dikeluarkan BPK RI terdapat juga daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LKPD tahun 2017 yaitu biaya perjalanan dinas ganda atau tidak sesuai ketentuan, telah ditemukan sebanyak 257 permasalahan senilai Rp. 87.448.950.000,00.

Salah satu cara untuk melihat apakah laporan keuangan yang telah disusun telah sesuai dengan SAP dan telah sesuai dengan kualitas yang diharapkan, dapat dilihat dari opini auditor. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Selatan sudah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017 untuk 18 kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Sejauh ini telah banyak kabupaten/kota yang telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tetapi masih terdapat satu kabupaten yang masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Penukal Abab Lematang Ilir merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Penukal Abab Lematang Ilir merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim yang disahkan tanggal 11 Januari 2013. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai kabupaten yang baru, masih banyak memiliki kekurangan dalam berbagai aspek yaitu perekonomian, teknologi, pembangunan, sumber daya manusia dan lainnya. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir salah satunya dalam menyusun laporan keuangan.

**Tabel I.1**  
**Hasil Opini BPK atas LKPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir**  
**Tahun 2014-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Hasil Opini BPK</b>
2014	TMP (Tidak Memberikan Pendapat)
2015	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2016	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2017	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)

Sumber : bpk.ri.go.id

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat bahwa opini yang diberikan oleh BPK RI atas LKPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir belum maksimal. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan kabupaten yang baru terbentuk. Kondisi sekarang, terdapat permasalahan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI di kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Beberapa permasalahannya yaitu ditemukan daftar akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP atau tidak didukung dengan bukti yang cukup pada LKPD tahun 2017. Daftar akunya yaitu aset lancar, aset tetap, belanja operasi, dan beban operasi – laporan operasional. Dan pada hasil wawancara, diperoleh bahwa setiap dinas telah mempunyai sistem. Sistem ini disebut sebagai SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Dan setiap dinas telah difasilitasi jaringan internet dari Dinas Kominfo, tetapi masih terdapat kendala sistem dan jaringan internet yang belum ada perbaikan secara rutin. Sehingga apabila terjadi masalah, maka masih menggunakan sistem yang manual.

Permasalahan pada tahun 2014 yang telah mendapat opini TMP yaitu ditemukannya adanya ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu kekurangan kas pada dinas pendidikan kebudayaan pemuda dan olahraga serta dinas tenaga kerja transmigrasi dan sosial belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 402.390.989,00, pengelolaan kas pada badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa tidak sesuai ketentuan, relisasi belanja perjalanan dinas pada tiga SKPD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.514.610.078,24. Pada tahun 2015 yang telah mendapat opini WDP ditemukannya ketidakpatuhan dan

ketidapatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu pengelolaan pinjam pakai kendaraan dinas tidak tertib, terdapat kendaraan dinas yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya belum dilakukan proses tuntutan ganti rugi, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas daerah tahun 2015 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.8.417.500,00.

Pada tahun 2016 yang telah mendapat opini WTP ditemukan adanya ketidapatuhan, kecurangan, dan ketidapatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu penetapan retribusi pelayanan kepelabuhan milik swasta pada dinas perhubungan, komunikasi dan informatika tidak tepat, pemotongan pajak penghasilan atas jasa giro rekening FKTP dinas kesehatan tidak sesuai ketentuan, kelebihan pembayaran tiket perjalanan dinas luar daerah pada tiga SKPD sebesar Rp. 35.599.006,00. Pada tahun 2017 mendapat opini WDP ditemukannya ketidapatuhan yaitu APBD yang diterima lebih dari 1 T tetapi belum terealisasi secara penuh termasuk pada pembangunan jalan, terdapat rancangan kerja anggaran (RKA) di beberapa dinas yang belum dilaporkan, tahun 2017 pencairan dana desa tahapan kedua sebesar 40% belum dilaporkan penggunaannya.

Menurut Kepala Perwakilan BPK Sumsel I Gede Kastawa (Berita Pagi, 31 Maret 2016), pihaknya masih memaklumi jika kabupaten baru seperti kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir masih mendapat opini tidak wajar karena sumber daya manusia Pemkab seringkali menghadapi kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut Joko Iman Santosa mengatakan, saat ini jumlah SDM di lingkungan Pemprov Sumsel yang berlatar belakang pendidikan akuntansi

hanya 179 orang. Lulusan diploma III 159 orang, 9 orang strata I dan II yang tersebar di 36 SKPD dari total 42 SKPD yang ada. Jumlah ini menunjukkan, SDM berlatar belakang Akuntansi masih kurang.

Berdasarkan opini atas laporan keuangan yang telah diterima dan permasalahan yang telah ditemukan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yaitu dinas-dinas yang terdapat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

**Tabel I.2**  
**Daftar Nama-Nama Dinas di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir**

No	Nama Dinas
1.	Dinas Pendidikan
2.	Dinas Kesehatan
3.	Dinas Pekerjaan Umum
4.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Lingkungan
5.	Dinas Sosial
6.	Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran
7.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
8.	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
9.	Dinas Ketahanan Pangan
10.	Dinas Lingkungan Hidup
11.	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
13.	Dinas Perhubungan
14.	Dinas Komunikasi Dan Informatika
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
16.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
18.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
19.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
20.	Dinas Perikanan
21.	Dinas Pertanian
22.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

Sumber: Pengolahan Data, 2019

Fenomena atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai dan bahkan keliru. Berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian sebelumnya penulis tertarik melakukan penelitian berjudul **Pengaruh Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan (PP No.71 Tahun 2010) Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh penerapan penyusunan laporan keuangan (PP No.71 tahun 2010) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan (Studi kasus pada dinas-dinas di Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir)?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan penyusunan laporan keuangan (PP No.71 tahun 2010) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir).



#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang penerapan penyusunan laporan keuangan (PP No.71 tahun 2010) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Bagi Dinas-Dinas di Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Hasil penelitian ini membantu Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai acuan untuk mengelola keuangan daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber-sumber informasi, referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta menjadi bahan acuan atau kajian bagi pihak-pihak yang akan mengadakan penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani (2008) *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali Fikri Biana Adha Inapty dan Sri Pancawati Martiningsih (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Akuntansi* 9 (1). Diakses 09 Oktober 2018, dari <file:///E:/Proposalku/Jurnal/3583-8553-2-PB.pdf>.
- Azuar Juliandi, dkk (2014) *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU PRESS.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2018) *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2018*. diakses pada Oktober 2018. Jakarta: <https://www.bpk.go.id>.
- Bambang Supriyadi, dkk (2017) *Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*. Cetakan Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo (2013). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada pemerintah kota tual). *Jurnal STIE Semarang* 5 (3). Diakses 23 Februari 2019, dari <file:///E:/Proposalku/Jurnal/123-1-10.pdf>.
- Dian Irma Diani (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman). *Artikel Ilmiah*. Diakses 10 Oktober 2018, dari <file:///E:/Proposalku/Jurnal/897-1843-1-SM.pdf>.
- Dedi Noerdiawan (2009) *ASP*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dunia Akuntansi dan Manajemen. 31 Maret 2008. Sistem Informasi Akuntansi. <http://yusufsofyan.blogspot.com>
- Duwi Priyatno (2016) *SPSS Hanbook*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: MediaKom.
- Keputusan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Keanggotaan KSAP.
- Mardiasmo (2002) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

- Marja Sinurat (2018) *Akuntansi Keuangan Daerah*. Cetakan Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ni Putu Yogi Merta Maeka Sari, Dkk (2014). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas Di Pemerintahan Kabupaten Jembrana. *E-Journal SI* 2(1). Diakses tanggal 09 Oktober 2018, dari file:///E:/Proposalku/Jurnal/ipi303193.pdf.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Akuntansi Daerah.
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Poerwadarminta. W.J.S. (2006) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ramli Faud (2016) *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Uma Sekaran (2017) *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 57 Tentang Perbendaharaan Negara.
- V. Wiratna Sujarweni (2015) *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustakabaru Press.
- Winwin Yadiati dan Abdulloh Mubarak (2017) *Kualitas Pelaporan Keuangan* (Edisi 1). Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima.
- Yani Riyanti, dkk (2015). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Peran Internal Audit Terhadap Efektivitas penyusunan Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Mahkamah Syar'iyah Di Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi* 4(2). Diakses 10 Oktober 2018, dari file:///E:/Proposalku/Jurnal/4472-8877-1-SM.